



# PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA 2018-2023

Arsiska Sari<sup>1</sup>, Noubel Putra Nainggolan<sup>2</sup>, Windi Octaviani<sup>3</sup>, Theresia Enjel  
Octavia Sihombing<sup>4</sup>, Feryanto Nababan<sup>5</sup>, Joko Suharianto<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

[arsiskasari2019@gmail.com](mailto:arsiskasari2019@gmail.com) [nobelnainggolan@gmail.com](mailto:nobelnainggolan@gmail.com)

[octavianiwindi5@gmail.com](mailto:octavianiwindi5@gmail.com) [theresiashb12@gmail.com](mailto:theresiashb12@gmail.com)

[ferinababan7@gmail.com](mailto:ferinababan7@gmail.com) [djoko@unimed.ac.id](mailto:djoko@unimed.ac.id)

## Abstract

This study aims to analyze the impact of the Open Unemployment Rate (TPT) and the Human Development Index (IPM) on the number of poor people in North Sumatra, Indonesia, from 2018 to 2023. Using a panel data model approach and secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), this study employs quantitative methods to identify the relationship between these variables. The analysis results show that IPM has a significant negative impact on the number of poor people, while TPT has a positive but insignificant impact. Together, TPT and IPM contribute 99.77% to the number of poor people in North Sumatra. These findings encourage the government and stakeholders to design policy interventions aimed at increasing labor force participation and the human development index, such as skills training and economic empowerment programs. This study provides an understanding of the dynamics of poverty in North Sumatra and the factors that influence it, and provides policy recommendations to address these issues.

**Keywords: Poverty, Poor People, TPT, IPM**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada periode 2018-2023. Dengan menggunakan pendekatan model data panel dan sumber data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi relasi antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan TPT memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Secara bersama-sama, TPT dan IPM berkontribusi 99,77% terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Temuan ini mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang intervensi kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia, seperti program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini

memberikan pemahaman mengenai dinamika kemiskinan di Sumatera Utara dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menyediakan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Penduduk Miskin, TPT, IPM

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering kali dikaitkan ketidakmampuan di sisi ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan secara absolut diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Nst, 2021).

Kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2023 menggambarkan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks di wilayah tersebut. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tantangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Dalam konteks ini, indikator seperti Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penting untuk dipahami dalam analisis dan pemetaan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami hubungan antara TPT, IPM, dan jumlah penduduk miskin di enam kabupaten/kota di Sumatera Utara, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam menangani permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut, serta memberikan arah bagi upaya-upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan jumlah penduduk miskin, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan di tingkat lokal. Dengan menganalisis variabel-variabel ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab atau penghambat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan sosial dari setiap kabupaten/kota, penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga dapat memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat, dan sektor swasta, dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk yang dikategorikan sebagai miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah ambang batas kemiskinan. Ambang batas kemiskinan dalam masyarakat ditetapkan untuk mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka ini berasal dari perhitungan yang mencakup kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan minimum pangan diukur dengan standar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, ambang batas kemiskinan untuk kebutuhan non-pangan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan (luas bangunan, akses air bersih, dan sanitasi), pendidikan (tingkat literasi, wajib belajar sembilan tahun, dan tingkat putus sekolah), dan kesehatan (konsumsi gizi yang kurang, akses fasilitas kesehatan yang terbatas, serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai) (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja dan berkeinginan untuk bekerja namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terkadang tidak berhasil atau tidak mencapai sasaran dengan baik. Pengangguran dapat disebabkan oleh fakta bahwa terdapat lebih banyak pekerja yang mencari pekerjaan daripada kesempatan kerja yang tersedia, serta karena kurangnya keterampilan dari para pencari kerja (underemployment). Jenis pengangguran yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan dikenal sebagai pengangguran paksa. Namun, di sisi lain, pengangguran juga bisa disebabkan oleh pilihan sukarela dari individu, terutama ketika pasar tenaga kerja sudah mencapai keseimbangan atau ketika tidak ada hambatan bagi individu untuk masuk atau keluar dari pasar tenaga kerja (Mufida & Nasir, 2023).

Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, hasilnya adalah penurunan produktivitas kerja masyarakat. Penurunan produktivitas tersebut menyebabkan pendapatan yang diperoleh menjadi rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. IPM atau Human

Development Index (HDI) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Meriyanti, 2015).

## **2. Kajian Pustaka**

### **1. Penduduk Miskin**

Orang miskin adalah sebagian dari masyarakat yang harus menghadapi keterbatasan ekonomi yang signifikan. Mereka memiliki pendapatan per individu per bulan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Garis kemiskinan, yang seringkali dijadikan sebagai indikator untuk menetapkan status kemiskinan, adalah batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, perlu dicatat bahwa kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan bahan material, tetapi juga meliputi faktor-faktor seperti kesempatan kerja yang layak, akses pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam yang melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan tujuan memberdayakan individu-individu miskin agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik (Samsudin et al., 2019).

Amartya Sen (1992) adalah seorang ahli ekonomi dan penerima Hadiah Nobel dalam Ekonomi. Dia berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan rendah, tetapi juga terkait dengan akses terhadap kesempatan dan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia. Sen menekankan pentingnya melihat kemiskinan sebagai kekurangan dalam kemampuan seseorang untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf Bengali, menawarkan perspektif baru tentang kemiskinan dalam bukunya *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (1981). Sen mendefinisikan kemiskinan bukan hanya sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai ketidakmampuan (capabilities) untuk mencapai kehidupan yang layak. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek seperti:

1. Kebebasan untuk hidup: Akses terhadap makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
2. Kebebasan untuk bertindak: Memiliki pilihan dan kontrol atas hidup mereka.
3. Kebebasan untuk berpartisipasi: Berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sen menjelaskan bahwa kemiskinan terkait dengan entitlement, yaitu hak dan akses individu terhadap sumber daya. Kemiskinan terjadi ketika individu tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, seperti:

- a. Aset: Tanah, modal, dan sumber daya alam.
- b. Pekerjaan: Peluang kerja yang layak dan adil.

- c. Jaminan sosial: Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Sen juga menggunakan konsep deprivasi untuk menjelaskan kemiskinan. Deprivasi adalah keadaan dimana individu tidak mampu mencapai standar hidup yang minimal. Hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Kelaparan: Kekurangan makanan yang parah.
- b. Kematian dini: Kematian yang terjadi sebelum usia harapan hidup normal.
- c. Ketidakmampuan untuk membaca dan menulis: Kurangnya akses terhadap pendidikan.

Sen mengkritik pendekatan tradisional yang mengukur kemiskinan hanya berdasarkan pendapatan. Pendekatan ini mengabaikan aspek penting lain dari kemiskinan, seperti kemampuan dan hak individu.

Gagasan Sen tentang kemiskinan memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus fokus pada:

1. Peningkatan kemampuan individu: Meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
2. Memperkuat entitlement individu: Melindungi hak dan akses terhadap sumber daya.
3. Mengurangi deprivasi: Mengatasi kekurangan dalam standar hidup.

Gagasan Sen tentang kemiskinan memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Pendekatannya menekankan pentingnya kemampuan, entitlement, dan deprivasi dalam memahami kemiskinan dan merumuskan kebijakan yang efektif.

## **2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran, secara luas, merujuk pada kondisi di mana individu yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan baru. Istilah ini mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah individu yang ingin bekerja dan kesempatan kerja yang tersedia, menyebabkan sebagian dari angkatan kerja tidak berhasil menemukan pekerjaan karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Penyebab utama pengangguran tidak hanya terbatas pada ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, tetapi juga pada kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja seringkali menjadi hambatan bagi individu untuk memenuhi persyaratan yang diajukan dalam lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, selain upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, penting juga untuk meningkatkan keterampilan dan pelatihan bagi angkatan kerja agar mereka dapat bersaing secara efektif di pasar kerja yang semakin kompetitif (Beatrice Karolinska, Irawati Panjaitan, 2023).

Ekonom Faisal Basri dalam artikelnya di CNBC Indonesia (2023) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi, terutama di kalangan muda. Faktor utama penyebabnya adalah mismatch antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan pendidikan formal yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Basri mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang dianggapnya belum berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Ia mendorong reformasi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja. Basri mempertanyakan fokus pemerintah pada industri padat karya yang dianggapnya tidak cocok dengan profil angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Ia mendorong pengembangan industri yang lebih inovatif dan berteknologi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Basri juga mengkritik kebijakan penetapan upah minimum yang dianggapnya terlalu tinggi dan memberatkan pengusaha. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali agar tidak menghambat penciptaan lapangan kerja. Basri prihatin dengan tingginya angka pengangguran terdidik, yaitu lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan. Ia melihat fenomena ini sebagai bukti kegagalan sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Basri mendorong beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran, seperti reformasi sistem pendidikan, mengembangkan industri yang lebih inovatif, meninjau kembali kebijakan upah minimum, memperkuat program pelatihan, dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan.

### **3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses manfaat dari upaya pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin dipublikasikan melalui laporan tahunan yang dikenal sebagai Laporan Pembangunan Manusia (HDR). IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan kesehatan yang baik, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dalam penelitian terdahulu, IPM dianggap sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas manusia. IPM memberikan gambaran tentang bagaimana individu memiliki akses terhadap hasil pembangunan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu metrik evaluasi kinerja daerah, terutama dalam menilai kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau penduduk setempat (Nurhaeni, 2022).

Mahbub ul Haq, seorang ekonom dan pakar pembangunan asal Pakistan, bersama dengan Amartya Sen dan Richard Jolly, merupakan pelopor konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pada tahun 1990. Haq mengkritik pendekatan tradisional yang mengukur pembangunan hanya berdasarkan PDB dan

meyakini bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia, dengan melihat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sebagai faktor penentu kesejahteraan.

IPM dirancang untuk mengukur kemajuan pembangunan dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak. Sejak diperkenalkan, IPM telah menjadi salah satu indikator pembangunan yang paling banyak digunakan di dunia dan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan manusia. Kontribusi Mahbub ul Haq dalam pengembangan IPM sangatlah signifikan. Gagasannya tentang pembangunan manusia dan komitmennya terhadap pengukuran yang lebih komprehensif telah memberikan pengaruh besar pada cara dunia memandang dan mengukur pembangunan. IPM terus berkembang dan diperbarui untuk memperhitungkan berbagai faktor, seperti ketimpangan, dan menjadi alat yang berharga untuk mengukur kemajuan pembangunan di seluruh dunia.

### **Hubungan TPT dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Dalam buku N.Gregory Mankiw (2007) teori Kurva Phillips, yang menunjukkan hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi, dapat dihubungkan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun inflasi yang rendah (akibat pengangguran tinggi) mungkin terlihat ideal, hal ini berakibat pada berkurangnya pendapatan masyarakat karena minimnya lapangan kerja. Sebaliknya, pengangguran yang rendah (meskipun berpotensi menyebabkan inflasi) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lebih banyak orang yang memiliki penghasilan. Dengan melihat hubungan ini, dapat dikatakan pengaruh positif pengangguran terhadap kemiskinan mungkin berfokus pada dampak hilangnya pendapatan akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan, alih-alih semata-mata melihat ketersediaan lapangan kerja.

Dampak dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Mufid (2014), yang menunjukkan bahwa faktor TPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap (Y). Hal ini mendorong individu untuk mencoba mempersiapkan diri untuk membuka usaha sendiri, sementara ada juga yang menunggu kesempatan untuk memulai pekerjaan, yang termasuk dalam klasifikasi pengangguran terbuka (Beatrice Karolinska, Irawati Panjaitan, 2023).

Joseph Stiglitz dalam bukunya "The Price of Inequality" menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan, bahkan di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang tidak merata ke peluang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik; konsumsi berlebihan kelompok kaya yang menghambat pertumbuhan ekonomi; penurunan mobilitas sosial; lemahnya jaring pengaman sosial; dan ketidakstabilan politik dan sosial. Pada penjelasan lainnya pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin dapat tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun, namun sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai

pelajar atau mahasiswa. Oleh karena itu, kebutuhan hidup mereka masih ditanggung oleh orang tua mereka karena mereka belum mampu secara finansial untuk mengatasi biaya hidup sendiri (MARISA, 2019).

### **Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Dalam teori Pembangunan menggambarkan terdapat korelasi negatif antara IPM dan tingkat kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM suatu negara, semakin rendah tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Keterkaitan negatif antara IPM dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Kedua, kesehatan yang lebih baik memungkinkan individu untuk menjadi lebih produktif di tempat kerja, yang juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Terakhir, kesejahteraan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Teori Human Capital dalam konteks yang berfokus pada produksi menyatakan bahwa kualitas dari sumber daya manusia tercermin dalam produktivitas ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa hasil atau output yang dihasilkan oleh sumber daya manusia adalah kemampuannya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan peningkatan profitabilitas perusahaan secara individual (Ns. Hidayati,2022).

### **3. Metode Penelitian (bold 12 pt)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan model data panel untuk analisisnya, dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews untuk mengolah dan menganalisis data. Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengidentifikasi serta menganalisis relasi antara beragam variabel yang menjadi fokus penelitian. Sumber data utama yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelumnya, khususnya oleh BPS dalam konteks ini. Keberadaan data sekunder ini sangat vital karena mencerminkan keadaan aktual dari berbagai variabel yang dianalisis. Sumber data tersebut memberikan tingkat keandalan dan validitas yang tinggi bagi penelitian, karena proses pengumpulan data telah dilakukan secara standar dan terpercaya. Data yang dijadikan subjek analisis berasal dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama rentang waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap tren dan pola yang mungkin terjadi dalam data, serta untuk memahami dinamika dan perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang.



Pemilihan Sumatera Utara sebagai wilayah penelitian dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mengingat ketersediaan data yang melimpah dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan demografi di wilayah tersebut. Dengan melibatkan 33 kabupaten/kota, penelitian ini meliputi variasi yang luas dalam kondisi lokal, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, penggunaan model data panel, metode kuantitatif, dan pemanfaatan sumber data sekunder dari BPS memberikan landasan yang kokoh bagi analisis dalam penelitian ini. Hal ini memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika dan pola yang mendasari berbagai variabel yang dianalisis dalam konteks Sumatera Utara selama periode waktu yang diteliti.

Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk melihat hasil penelitian yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y** = Jumlah Penduduk Miskin  
**X1** = Tingkat Pengangguran Terbuka  
**X2** = Indeks Pembangunan Manusia  
 **$\beta_0$**  = Konstanta  
 **$\beta_1$  dan  $\beta_2$**  = Koefisien Regresi

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Melalui analisis data panel, kami mengikuti serangkaian langkah untuk memahami dan mengevaluasi keterkaitan antara variabel yang terlibat. Langkah pertama adalah menentukan model terbaik melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow membantu kami menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara parameter regresi pada dua atau lebih subgrup dalam data panel, sedangkan uji Hausman membantu kami memilih antara model fixed effects atau random effects. Setelah model terbaik ditentukan, kami melanjutkan dengan uji asumsi klasik, termasuk uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas membantu kami memeriksa apakah ada masalah dengan hubungan linear antara variabel independen, sementara uji heteroskedastisitas membantu kami memeriksa apakah ada ketidakseragaman varians dalam residual model regresi. Langkah terakhir adalah menganalisis hubungan antar variabel melalui uji regresi linear berganda (Nani, 2022)

#### Pemilihan Model :

1. Uji chow adalah uji yang digunakan untuk menilai model mana yang terbaik untuk digunakan, Adapun model yang dimaksud yaitu : Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).

**Tabel 1. Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	2164.3571		
Cross-section F	55	(32,163)	0.0000
	1198.7345		
Cross-section Chi-square	85	32	0.0000

Berdasarkan hasil prob di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji cow model yang digunakan adalah Fixed Effect Mode (FEM) yang memenuhi syarat dengan nilai prob. sebesar  $0.0000 < 0.05$ .

2. Uji hausman adalah uji yang digunakan untuk menilai apakah uji Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) lebih baik daripada Common Effect Model (CEM).

**Tabel 2. Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.018462	2	0.0110

Berdasarkan hasil prob diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji hausman ini model yang digunakan tetap Fixed Effect Model (FEM) yang memenuhi syarat prob. sebesar  $0.0110 < 0.05$ .

#### **Asumsi Klasik :**

1. Uji Multikolinearitas, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel independent (bebas). Syarat untuk mengetahui adakah korelasi antar variabel ini yaitu nilai korelasi antar variabel bebas  $< 0.8$  ( jika nilai korelasi  $< 0.8$  maka variabel-variabel bebas dinyatakan lolos uji multikolinearitas) (Napitupulu, 2021).

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

	TPT	IPM
TPT	1.000000	0.487109
IPM	0.487109	1.000000

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada uji multikolinearitas ini dinyatakan lolos uji dengan memenuhi syarat nilai korelasi  $< 0.8$ .

2. Uji Heteroskedastisitas, uji ini digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan mengalami eror atau tidak. Syarat untuk lolos dari uji ini yaitu nilai prob  $> 0.05$ .

**Tabel 4.** Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.673693	2.512794	-0.268105	0.7890
TPT	0.037381	0.036091	1.035722	0.3019
IPM	0.014978	0.035066	0.427134	0.6698

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini terbebas atau lolos dari uji heteroskedastisitas dengan memenuhi syarat nilai prob TPT dan IPM. sebesar 0.30 dan 0.66 > 0.05.

**Regresi Berganda :****Tabel 5.** Hasil Regresi Berganda

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	94.73410	10.23603	9.254962	0.0000
TPT	0.153555	0.147021	1.044443	0.2978
IPM	-0.792846	0.142843	-5.550476	0.0000

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.99806 1	F-statistic	2467.262
Adjusted R-squared	0.99765 6	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari tabel regresi berganda diatas dapat diperoleh persamaan dan penjelasan untuk data panel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Persamaan :

$$P.Miskin : 94.73410 + 0.153555 TPT - 0.792846 IPM$$

1. Nilai C/konstanta sebesar 94.73410. Artinya , jika TPT dan IPM adalah nol, maka jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 94.73410 jiwa.
2. Nilai koefisien regresi TPT bernilai positive sebesar 0.153555, yang artinya jika TPT meningkat sebesar 1% (persen), maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 0.153555 jiwa.
3. Nilai koefisien regresi IPM bernilai negative sebesar – 0.792846, yang artinya jika IPM menurun sebesar 1% (persen), maka jumlah penduduk miskin di

Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 0.792846 jiwa.

### **Uji T (Simultan) :**

Uji t (simultan) ini digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel independe (bebas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini nilai yang dapat diamati yaitu nilai prob pada tabel 5, dimana yang pertama variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai prob. sebesar  $0.2978 > 0.05$ , maka dapat diartikan bahwa variabel TPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dan yang kedua yaitu variabel indeks Pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai prob. sebesar  $0.000 < 0.05$ , yang artinya variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

### **Uji F (Parsial) :**

Uji f (parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu TPT dan IPM berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat yaitu jumlah penduduk miskin. Pada penelitian ini yang dapat diamati dan dijadikan syarat yaitu nilai prob pada f-statistik pada tabel 5, Dimana nilai prob. sebesar  $0.0000 < 0.05$ , yang artinya kedua variabel bebas ini memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat ( terdapat pengaruh signifikan pada kedua variabel bebas).

### **Koefisien Determinan :**

Uji ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaruh dari variabel TPT dan IPM mempengaruhi variabel jumlah penduduk miskin. Pada penelitian ini yang harus diamati yaitu nilai Adjusted R-Squared pada tabel 5, dimana nilainya yaitu sebesar 0.997656. Menurut (Ghozali, 2018) jika nilai Adjusted R-Squared mendekati angka 1, maka hal itu menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas sangat mempengaruhi variabel terikat. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel TPT dan IPM memberikan pengaruh sebesar 99,77% terhadap jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Sumatera Utara dan sisanya sebesar 0,23% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak berkontribusi pada penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Dalam artikelnya (Basri, 2023), Ekonom Faisal Basri menyampaikan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, salah satu faktor utama penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Basri menyoroti bahwa banyak lulusan pendidikan formal yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri. Ia mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya berfokus pada kebutuhan pasar kerja, dan

mendorong adanya reformasi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan yang sesuai.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Yang artinya peningkatan TPT tidak meningkatkan jumlah penduduk miskin secara langsung. Alasan terjadinya ketidaksignifikanan dalam penelitian ini adalah karena masih banyaknya ketimpangan yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara, yang mana ketimpangan yang ada berbeda-beda pada setiap kondisi geografis kabupaten/kotanya. Salah Satu contohnya yaitu : Samosir, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, menawarkan UMK yang lebih rendah dan ekonomi yang didominasi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi wisata alam dan budaya Samosir yang besar menjadi daya tarik utama. Di sisi lain, Deli Serdang memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi, namun menawarkan UMK yang lebih tinggi dan ekonomi yang didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Keberadaan kawasan industri dan perdagangan yang maju di Deli Serdang menjadi peluang kerja yang menarik bagi banyak orang.

Hal diatas didukung oleh pendapat Joseph Stiglitz dalam bukunya "The Price of Inequality" menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan, bahkan di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang tidak merata ke peluang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik; konsumsi berlebihan kelompok kaya yang menghambat pertumbuhan ekonomi; penurunan mobilitas sosial; lemahnya jaring pengaman sosial; dan ketidakstabilan politik dan sosial (Stiglitz, 2012).

Dan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh (MARISA, 2019) dimana pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan, strategi yang efektif mungkin perlu fokus pada aspek-aspek lain dari ekonomi selain pengangguran, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan melindungi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

### **Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Mahbub ul Haq, seorang ekonom dan ahli pembangunan Pakistan, bersama dengan Amartya Sen dan Richard Jolly, dikenal sebagai tokoh utama dalam konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pada tahun 1990. Haq mengkritik pendekatan tradisional yang hanya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran pembangunan, dan ia percaya bahwa pembangunan seharusnya difokuskan pada manusia, dengan memperhatikan aspek kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup sebagai indikator utama kesejahteraan. IPM dirancang untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan dengan memperhitungkan tiga dimensi utama: umur panjang dan kesehatan yang baik, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Sejak diperkenalkan, IPM telah menjadi salah satu indikator pembangunan yang paling populer di dunia, yang membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan manusia. Kontribusi Mahbub ul Haq dalam pengembangan IPM sangat penting. Konsepnya tentang pembangunan manusia dan komitmennya terhadap pengukuran yang lebih holistik telah memiliki dampak besar pada cara pandang dan pengukuran pembangunan di seluruh dunia. IPM terus mengalami perkembangan dan pembaruan untuk memperhitungkan berbagai faktor, termasuk ketimpangan, dan telah menjadi alat yang berharga untuk menilai kemajuan pembangunan secara global.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Yang artinya peningkatan IPM dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Beatrice Karolinska, Irawati Panjaitan, 2023) dan (Ni Komang Noviyanti, 2023). Signifikansi temuan ini tidak dapat diabaikan, karena mengindikasikan bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, langkah-langkah seperti meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan meningkatkan standar hidup dapat dianggap sebagai tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM. Dengan demikian, penerapan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan IPM memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam menjelaskan situasi jumlah penduduk miskin di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Faktor yang paling memengaruhi tingkat kemiskinan adalah Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 99.77%. Meskipun TPT menunjukkan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, namun pengaruhnya tidak signifikan. Pemahaman ini dapat didukung dengan konsep yang ditekankan oleh Joseph Stiglitz dalam bukunya "The Price of Inequality". Stiglitz menyoroti dampak ketidaksetaraan ekonomi dan faktor-faktor lainnya terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan. Di Sumatera Utara, perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti demografi dan pasar tenaga kerja. Penelitian oleh Marisa (2019) juga menegaskan bahwa variabel seperti tingkat pendidikan dan keikutsertaan dalam angkatan kerja berperan penting dalam memahami hubungan antara TPT dan jumlah penduduk

miskin. Sebagian besar angkatan kerja produktif di Sumatera Utara adalah mahasiswa yang masih fokus pada pendidikan mereka, sehingga tidak secara langsung berpengaruh pada tingkat kemiskinan.

Berdasarkan temuan bahwa TPT dan IPM secara signifikan memengaruhi jumlah penduduk miskin, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang dan melaksanakan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Misalnya, program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja, serta program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

- Basri, F. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi, Ini Penyebabnya. In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tag/pengangguran>
- Beatrice Karolinska, Irawati Panjaitan, R. S. (2023). *PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA*. 11(2), 213–225.
- Dkk, F. A. (2022). *Ekonomi Pembangunan* (R. Kusumaningrum (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hilmi, Moh. Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati, C. D. P. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi* (S. wibi hrdani, M.M, Devri Barnadi, S.E (ed.); 6th ed.). Penerbit Erlangga.
- MARISA, M. (2019). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1156>
- Mufida, L. L. A., & Nasir, M. S. (2023). Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.15>
- Nani. (2022). Step by Step Analisa Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. In A. N. Egy Gunawan Ahmad (Ed.), *Visi Intelegensia: Vol. Vol. 1*. CV. Visi Intelegensia. <https://repository.uinbanten.ac.id/11748/1/E-Book Data Panel Eviews.pdf>
- Napitupulu, R. B. (2021). Teknik dan Analisis Data SPSS-STATA-EVIEWS. In P. Bisnis (Ed.), *Jetri: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* (1st ed.). MADENATERA.

<https://doi.org/10.25105/jetri.v20i2.16144>

- Ni Komang Noviyanti, K. S. Y. S. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2018-2022. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 4(2), 153–161. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v4i2.278>
- Nurhaeni. (2022). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab&Kota di Prov Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 26.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Antasari Press* (pertama). Antasari Press Jl. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahmawati, A. N. D. N. (2018). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In A. S. W. W. Y. Karyono (Ed.), *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.
- Rizky Febrian Saragih, Purnama Ramadani Silalahi, K. T. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 3369–3376.
- Samsudin, H., Sadiman, & Pachrozi, I. (2019). *Kajian Sosial Menuju Kemiskinan Satu Digit*. 1–141.
- Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. In J. E. Stiglitz (Ed.), *W. W. NORTON & COMPANY* (First). W. W. NORTON & COMPANY. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3685>